



Judul : RUU Pemerintahan Aceh, Baleg sepakat perpanjang otsus
Tanggal : Minggu, 19 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Pemerintahan Aceh Baleg DPR Sepakat Perpanjang Otsus

BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat memperpanjang pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemberian dana otsus sudah berlangsung selama 20 tahun, dan akan berakhir pada 1 Januari 2027. Karena itu, Baleg sudah sepakat akan memperpanjang kekhususan pemerintahan Aceh ini, termasuk memperpanjang dana otonomi khusus.

"Kami tinggal membahas perihal besaran dana otsus maupun hal-hal lainnya," ujar Doli dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Diketahui, Baleg DPR menargetkan pembahasan revisi UUPA dapat diselesaikan pada tahun 2026, sejalan dengan harapan Pemerintah Aceh. Supaya regulasi tersebut segera memberikan kepastian terkait masa depan dana otsus yang akan berakhir pada 2027.

Doli mengatakan, penyusunan RUU Pemerintahan Aceh berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), baik mineral, energi, kehutanan, dan lainnya. Selain itu, ada beberapa usulan dari Pemerintah Aceh berkaitan memperpanjang batas wilayah laut, pembagian kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

Atas masukan dari Pemerintah Aceh, kata Doli, Baleg DPR akan berdiskusi dengan

sejumlah kementerian/lembaga, yang menaungi urusan kelautan, kehutanan, hingga energi. Pihaknya, meminta masing-masing kementerian memberikan hasil evaluasi dan catatan terhadap pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 selama ini. "Nantinya akan diproyeksikan dengan pembahasan undang-undang yang baru," kata politikus Golkar ini.

Sementara, anggota Baleg DPR Teuku Abdul (TA) Khalid menilai, pengelolaan dana otsus Aceh belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun dana otsus telah digelontorkan selama hampir dua dekade, hasil yang dirasakan masyarakat masih belum maksimal. Sehingga diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola dana tersebut.

"Kita paham sekian banyak uang sudah di Aceh, tetapi tingkat kesejahteraan belum maksimal," kritik Khalid dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Atas fakta itu, Khalid meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kendala dalam proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebelum disahkan. Mekanisme evaluasi tersebut seharusnya mampu memastikan penggunaan dana otsus berjalan tepat sasaran.

Pemerintah Aceh, kata dia, tidak sepenuhnya memiliki kewenangan mandiri dalam penggunaan dana otsus karena tetap berada dalam pengawasan Pempus. Karena itu, diperlukan identifikasi hambatan dalam proses pengawasan dan evaluasi agar pengelolaan dana dapat berjalan lebih efektif. ■ TIF